

**MONITORING KEJADIAN RISIKO**

Nama pemilik risiko : Sekretaris Daerah  
 Nama pengelola risiko : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Risiko	Tanggal terjadi	Tempat terjadi	Lama kejadian	Pemicu kejadian	Dampak kejadian		Kejadian ke ...	Pengendalian yang ada	Penanganan yang dilakukan	Efektifitas penanganan
					Jenis dampak	besar dampak				
diisi dengan pernyataan risiko	diisi dengan tanggal terjadinya risiko	diisi dengan lokasi terjadinya risiko	diisi dengan lama terjadinya risiko	diisi dengan sebab terjadinya risiko	materil / immateril	diisi dengan akibat yang ditimbulkan	diisi dengan kejadian ke berapa	diisi dengan pengendalian yang ada	diisi dengan penanganan yang dilakukan	diisi dengan efektifitas penanganan
Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	TW I- TW IV	Sekretariat Daerah	TW I- TW IV	Data tidak tersedia dari stakeholder	materil / keuangan	Dokumen pelaporan tidak disajikan dengan benar	1	Komitmen pelaksana kegiatan untuk menyediakan bahan kelengkapan/ dokumen SPJ tepat waktu	Diterbitkannya himbuan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan Dokumen SPJ	E
Penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	TW I- TW IV	Sekretariat Daerah	TW I- TW IV	Dokumen Pendukung laporan keuangan yang tidak memadai	materil / keuangan	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	1	Komitmen pelaksana kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan yang akuntabel	Diterbitkannya himbuan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan Dokumen Perencanaan	E
Terganggunya jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan yang berbasis aplikasi	TW I- TW IV	Sekretariat Daerah	TW I- TW IV	Jaringan/ Peralatan Internet yang tidak memadai	materil / keuangan	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	1	Pemantauan jaringan SIPKD	Peningkatan kualitas Jaringan SIPKD dan SIPD dengan cara mengupgrade router	E
Nama pemilik risiko				: Bupati						
Nama pengelola risiko				: Petugas Pelaporan						
	0 TWI-TWII	Kab. Lima Puluh Kota	6 Bulan	Infasi, bencana alam, faktor cuaca, HBKN	keuangan	harga tidak stabil	Sepanjang TW I-TW II	Pemantauan Harga, Gerakan Pasar Murah dan Distribusi Cadangan Beras Pemerintah dan SPHP	Pemantauan Harga, Gerakan Pasar Murah dan Distribusi Cadangan Beras Pemerintah dan SPHP	Efektif
Nama pemilik risiko				: Bupati						
Nama pengelola risiko				: Kepala Bagian Perekonomian dan SDA						
Penyaluran Pupuk Bersubsidi tidak memenuhi prinsip 6T (Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu dan Tepat Mutu)	TW I	Kab. Lima Puluh Kota	1 Bulan	Keterlambatan Penyaluran	-	Pupuk terlambat diterima	1 Bulan	Monitoring dan Rapat Koordinasi KP3	Monitoring dan Rapat Koordinasi KP3	E
Nama pemilik risiko				: Pelaku pengadaan (PA, PPK, Pokja Pemilihan, PP, Penyedia)						
Nama pengelola risiko				: Pelaku pengadaan (PA, PPK, Pokja Pemilihan, PP, Penyedia)						

0	Pada pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa	UKPBJ		Belum maksimalnya pelaksanaan penyusunan Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Immateril	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persoalan hukum dibelakang hari	1	Pembahasan Dokumen Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Penyediaan Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	E
Nama pemilik risiko				: Kepala Daerah/Sekretaris Daerah						
Nama pengelola risiko				: Kepala Bagian Pemerintahan						
Keseriusan Pejabat pengambil keputusan pada OPD masih minim	Pada tahapan pemasukan data dan verifikasi oleh tim verifikasi Propinsi	Perangkat Daerah	triwulan 2	Peraturan yang mengatur berubah dan pemahaman SDM yang melaksanakan penyusunan laporan masih rendah	immateril	Nilai EKPPD tidak maksimal	1	Menyampaikan surat teguran pada OPD Teknis yang belum memenuhi permintaan data IKK		KE
Pelaksanaan Rapat Koordinasi belum maksimal		Sekretariat Daerah	triwulan 2	padatnya kegiatan kepala daerah dan pejabat perangkat daerah	immateril	Rapat Koordinasi tidak terlaksana	1	Teguran dari Pimpinan bagi Ka OPD yang tidak mengahdiri Rapat Koordinasi		KE
Nama pemilik risiko				: Sekretaris Daerah						
Nama pengelola risiko				: Kepala Bagian Administrasi Pembangunan						
Sering terlambatnya OPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)	Pada tahap pengumpulan data RFK dari OPD	Bagian Administrasi Pembangunan	Periode Triwulan II	Masih rendahnya realisasi RFK pada bulan Mei 2024	Immateril	Terlambatnya Penyampaian Rekapitulasi Laporan RFK Kabupaten Lima Puluh Kota , yang melewati tanggal 10 setiap bulannya	1	Monitoring lanjutan	Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pelaksanaan APBD	KE
Sering terlambatnya respon OPD dalam menyediakan data yang diminta yang menyebabkan keterlambatan input data, evaluasi data, dan pengambilan tindakan pengendalian.	1. Pada tahap permintaan data prmasalahan di OPD dalam pelaksanaan APBD 2024 2. Pada tahap permintaan dokumen kontrak untuk diregistrasi	Bagian Administrasi Pembangunan	Periode Triwulan II	Adanya surat permintaan data Kontrak dari BPK	Immateril	1. Tidak adanya laporan permasalahan OPD dalam Pelaksanaan APBD, Namun realisasi tetap rendah 2. Tidak tersedianya data yang memadai untuk dikirimkan ke BPK	1	Monitoring lanjutan	Pengiriman surat permintaan data ke OPD	KE
Nama pemilik risiko				: Kepala Bagian Umum						
Nama pengelola risiko				: Kepala Bagian Umum						

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana partisi kantor, lemari arsip, gudang arsip dan gudang perlengkapan	Tahun 2024	Bagian Umum	Tahun 2024	Terbatasnya anggaran dalam memenuhi sarana dan prasarana partisi kantor, lemari arsip, gudang arsip dan gudang perlengkapan	materil / keuangan	Tidak tersedianya partisi kantor, lemari arsip, gudang arsip dan gudang perlengkapan sehingga kantor kurang rapi dan arsip menumpuk		Evaluasi	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran sesuai kebutuhan yang ada	E
Belum terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun 2024	Bagian Umum	Tahun 2024	Banyaknya kebutuhan penyediaan alat dan perlengkapan kantor seperti PC, Laptop, Printer dll serta alat-alat kebersihan dikarenakan anggaran yang terbatas	materil / keuangan	Terbatasnya alat dan perlengkapan kantor sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan		Evaluasi	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran sesuai kebutuhan yang ada	E
Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	Tahun 2024	Bagian Umum	Tahun 2024	Banyaknya anggaran yang diperlukan untuk perbaikan aula, parkir dan konstruksi atap	materil / keuangan	Menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan di Gedung Kantor Sekretariat Daerah		Evaluasi	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran sesuai kebutuhan yang ada	E
Belum terakomodirnya pemeliharaan seluruh kendaraan dinas operasional yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang	Tahun 2025	Bagian Umum	Tahun 2025	terbatasnya anggaran untuk perbaikan atau pemeliharaan kendaraan dinas	materil / keuangan	Menghambat kelancaran mobilitas pelaksanaan tugas kedinasan yang menggunakan kendaraan dinas		Evaluasi	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran sesuai kebutuhan yang ada	E
Nama pemilik risiko				: Kepala Bagian Prokopim						
Nama pengelola risiko				: Kepala Bagian Prokopim						
Belum terakomodirnya Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemenuhan undangan kedinasan ke Luar Daerah	Tahun 2024	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tahun 2024	Terbatasnya anggaran dalam perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	materil / keuangan	Kurangnya partisipasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Kegiatan Nasional sehingga berdampak pada Eksistensi Daerah untuk tingkat Nasional		Evaluasi	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran sesuai kebutuhan yang ada	E
Belum terpenuhinya Pendampingan Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dalam Kegiatan Kunjungan ke Luar Daerah	Tahun 2024	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tahun 2024	Terbatasnya anggaran dalam perjalanan Dinas pendampingan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	materil / keuangan	Kurangnya informasi yang akan dijadikan bahan laporan atau rencana kegiatan Kepala/Wakil Kepala Daerah saat melaksanakan kegiatan Luar Daerah		Evaluasi	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran sesuai kebutuhan yang ada	E

Belum terpenuhinya penyediaan Jasa Pengamanan Patwal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tahun 2024	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tahun 2024	Banyaknya kegiatan Satlantas Polres 50 Kota Namun Personil terbatas	materil / keuangan	Menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan di tempat tujuan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Evaluasi	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Polres 50 Kota terkait ketersediaan personil sesuai kebutuhan yang ada	E
Nama pemilik risiko				: Sekretaris Daerah						
Nama pengelola risiko				: Kepala Bagian Hukum						
1. Keterlambatan dalam proses harmonisasi terhadap Produk Hukum Daerah di Kanwil Kemenkumham	Penyusunan	Bagian Hukum	Periode Triwulan II	Banyaknya Kabupaten/Kota yang harus difasilitasi oleh Kanwil Kemenkum dan HAM	Immateril	Terlambatnya dalam penetapan produk hukum daerah	1	Peningkatan koordinasi langsung untuk perbaikan oleh perancang di Kanwil	Peningkatan koordinasi langsung untuk perbaikan oleh perancang di Kanwil	KE
2. Keterlambatan OPD dalam memperbaiki hasil harmonisasi Produk Hukum Daerah	Pembahasan	Bagian Hukum	Periode Triwulan II	Kurang Paham dalam membaca regulasi	Immateril	Terlambatnya dalam penetapan produk hukum daerah	1	Peningkatan koordinasi langsung untuk percepatan perbaikan produk hukum oleh OPD dan membantu OPD dalam Memperbaiki hasil Harmonisasi	Peningkatan koordinasi langsung untuk percepatan perbaikan produk hukum oleh OPD dan membantu OPD dalam Memperbaiki hasil Harmonisasi	
Nama pemilik risiko				: Kepala Daerah						
Nama pengelola risiko				: Kepala Bagian Organisasi						
Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerja	Pada penyusunan dokumen AKIP Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota	Bagian Organisasi SETDA	TW I	Rotasi Jabatan pada Perangkat Daerah	materil	Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal	1	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi ke perangkat daerah	E
Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang belum mampu menjawab isu strategis yang dihadapinya	Pada penyusunan dokumen AKIP Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota	Bagian Organisasi SETDA	TW I	Rotasi Jabatan pada Perangkat Daerah	materil	Program dan kegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat	1	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi ke perangkat daerah	E
Keterlibatan pimpinan OPD dalam penetapan kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencapaian kinerja belum maksimal	Pada penyusunan dokumen AKIP Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota	Bagian Organisasi SETDA	TW I	Rotasi Jabatan pada Perangkat Daerah	materil	Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga implementasi SAKIP belum maksimal	1	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi ke perangkat daerah	E

Umpan balik dari laporan kinerja yang berupa perbaikan atas perencanaan kinerja belum dirumuskan dengan baik	Pada penyusunan dokumen AKIP Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota	Bagian Organisasi SETDA	TW I	Rotasi Jabatan pada Perangkat Daerah	materil	Laporan kinerja belum dapat dimanfaatkan secara maksimal	1	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi ke perangkat daerah	E
Nama pemilik risiko				: Kepala Daerah						
Nama pengelola risiko				: Kepala Bagian Kesra						
Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	Triwulan II 2024	Bag. Kesra / DPMDN / Nagari	Triwulan II 2024	Tidak terlaksananya pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	immateral	SDM menjadi rendah	1	Komitmen pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	Pelaksanaan Pelatihan SDM Bidang Keagamaan	E
Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	Triwulan I 2024	Bag. Kesra	Triwulan I 2024	kurang tersedianya anggaran untuk hibah infrastruktur dan kelembagaan agama	materil dan immateral	kurangnya sarana kelembagaan agama	1	Dialokasikannya dana hibah infrastruktur kelembagaan agama	Bantuan Hibah untuk lembaga keagamaan	E
Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	Triwulan I 2024	Bag. Kesra	Triwulan I 2024	program pemberdayaan sosial ekonomi tidak berjalan	materil	Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	1	Dilaksanakannya penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	pemberdayaan sosial ekonomi bekerja sama dengan Baznas	E
Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang	Triwulan II 2023	Bag. Kesra / DPMDN / Nagari	Triwulan II 2023	tidak terlaksananya pelatihan SDM bidang adat dan budaya	materil dan immateral	Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang	1	Komitmen pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan SDM terkait adat dan budaya	Pelatihan SDM terkait bidang adat dan budaya	E
Belum optimal peran dan fungsi kelembagaan adat dan budaya	Triwulan II 2024	Bag. Kesra / DPMDN / Nagari	Triwulan II 2024	Pembinaan kepada lembaga adat dan budaya tidak terlaksana	materil dan immateral	Belum optimal peran dan fungsi kelembagaan adat dan budaya	1	Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan adat dan budaya	Optimalisasi peran dan fungsi lembaga adat dan budaya	E

Sarilamak, 2024  
Sekretaris Daerah

**HERMAN AZMAR, AP, M.Si**  
NIP 19730913 199311 1 001

**PERUBAHAN / TAMBAHAN PENANGANAN RISIKO**

NO.	KODE RISIKO	DESKRIPSI KEJADIAN RISIKO	TANGGAL	PENANGAN AN RISIKO AWAL	PERUBAHAN / TAMBAHAN PENANGANAN RISIKO	ESTIMASI BIAYA	PEMILIK RISIKO	PELAKSANA PENANGANAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN RISIKO
						(Rp.)			
1			NIHIL						
2									
3									

Sarilamak, 2024  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota

**HERMAN AZMAR, AP, M.Si**  
NIP 19730913 199311 1 001

**PEMANTAUAN ATAS PERINGKAT RISIKO  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO.	KODE RISIKO	DESKRIPSI KEJADIAN RISIKO	TINDAKAN PENANGANAN RISIKO YANG TELAH DILAKUKAN	EFEKTIFITAS TINDAKAN PENANGANAN RISIKO		PROBABILITAS	DAMPAK	STATUS AWAL	PROBABILITAS	DAMPAK	STATUS AKHIR	KETERANGAN (PERUBAHAN STATUS BUKAN KARENA TINDAKAN PENANGANAN RISIKO)
				KURANG EFEKTIF	CUKUP EFEKTIF	AWAL	AWAL		AKHIR	AKHIR		
				[√]	[√]							
1	<i>diisi dengan kode risiko</i>	<i>diisi dengan uraian kejadian risiko</i>	<i>diisi dengan tindakan penanganan risiko yang telah dilakukan</i>	<i>diisi centang bila kurang efektif</i>	<i>diisi centang bila cukup efektif</i>	<i>diisi dengan skala kemungkinan awal</i>	<i>diisi dengan skala dampak awal</i>	<i>diisi dengan status awal</i>	<i>diisi dengan skala kemungkinan akhir (setelah dilakukan penanganan risiko)</i>	<i>diisi dengan skala dampak awal setelah dilakukan penanganan risiko</i>	<i>diisi dengan status akhir</i>	
1.	ROO.24.99.02.0 1	Bahan kelengkapan laporan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	Diterbitkannya himbauan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan Dokumen SPJ		√	2	3	Tinggi	3	4	Rendah	
2.	ROO.24.99.02.0 2	Penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	Diterbitkannya himbauan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan Dokumen Perencanaan		√	3	3	Tinggi	3	4	Rendah	
3.	ROO.24.99.02.0 3	Terganggunya jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan yang berbasis aplikasi	Peningkatan kualitas Jaringan SIPKD dan SIPD dengan cara mengupgrade router		√	4	2	Tinggi	2	4	Rendah	
4.	RSP.24.99.02.0 1	Tidak stabilnya harga barang pokok penting (harga barang naik) dan langkanya barang pokok penting di pasaran	Pemantauan Harga, Gerakan Pasar Murah dan Distribusi Cadangan Beras Pemerintah dan SPHP		v	3	2	Tinggi	1	1	Rendah	
5.	RSP.24.99.02.0 2	Penyaluran Pupuk Bersubsidi tidak memenuhi prinsip 6T (Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu dan Tepat Mutu)	Monitoring dan Rapat Koordinasi KP3		v	2	1	Rendah	1	1	Rendah	

6.	RSO.24.33.02.03	Tidak terlaksananya proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	Penyediaan Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	√		2	2	Rendah	1	1	Rendah
7.	RSO.24.33.02.02	Pemahaman indikator dan ketersediaan sumber data yang masih rendah dari beberapa Perangkat Daerah	Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Biro Perekonomian	√		3	3	Sedang dan Tinggi	3	2	Sedang
8.	RSO.24.33.02.01	Padatnya kegiatan kepala daerah dan pejabat perangkat daerah	Koordinasi dengan pimpinan di daerah	√		3	3	Sedang dan Tinggi	3	3	Tinggi
9.	RSO.24.99.01	Sering terlambatnya OPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)	Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pelaksanaan APBD	√		4	3	Sangat Tinggi	3	2	Sedang
10.	RSO.24.99.02	Sering terlambatnya respon OPD dalam menyediakan data yang diminta yang menyebabkan keterlambatan input data, evaluasi data, dan pengambilan tindakan pengendalian.	Pengiriman surat permintaan data ke OPD	√		4	3	Sangat Tinggi	3	3	Tinggi
11	ROO.24.99.03	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana partisi kantor, lemari arsip, gudang arsip dan gudang perlengkapan	1. Evaluasi data kebutuhan sarana dan prasarana partisi kantor, lemari arsip, gudang arsip dan gudang perlengkapan di Renja OPD dengan anggaran yang tersedia 2. Membuat telaahan staf dan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran terkait kebutuhan sarana dan prasarana partisi kantor, lemari arsip, gudang arsip dan gudang perlengkapan	√		3	4	Tinggi	3	4	Tinggi

12	ROO.24.99.04	Belum terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1. Evaluasi data kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di Renja OPD dengan anggaran yang tersedia 2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran terkait kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	√	3	4	Tinggi	3	4	Tinggi
13	ROO.24.99.02	Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	1. Evaluasi data kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor di Renja OPD dengan anggaran 2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran terkait kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor 3. Sosialisasi terkait SOP tentang pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	√	3	4	Tinggi	3	4	Tinggi
14	ROO.24.99.03	Belum terakomodirnya pemeliharaan seluruh kendaraan dinas operasional yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang	1. Evaluasi data kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional di Renja OPD dengan anggaran yang tersedia 2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran terkait kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional 3. Sosialisasi terkait SOP tentang pemeliharaan kendaraan dinas operasional	√	3	4	Tinggi	3	4	Tinggi
15	ROO.24.99.02	Belum terakomodirnya Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemenuhan undangan kedinasan ke Luar Daerah	1. Evaluasi kebutuhan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kunjungan ke Luar Daerah 2. Membuat telaahan staf dan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran terkait kebutuhan	√	3	4	Tinggi	3	4	Tinggi

16	ROO.24.99.02	Belum terpenuhinya Pendampingan Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dalam Kegiatan Kunjungan ke Luar Daerah	1. Evaluasi kebutuhan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam pendampingan kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kunjungan ke Luar Daerah 2. Membuat telaahan staf dan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran terkait kebutuhan		√	3	4	Tinggi	3	4	Tinggi	
17	ROO.24.99.02	Belum terpenuhinya penyediaan Jasa Pengamanan Patwal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1. Evaluasi kebutuhan jasa Pengamanan Patwal Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 2. Melakukan koordinasi dengan Polres 50 Kota terkait ketersediaan personil Patwal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		√	3	4	Tinggi	3	4	Tinggi	
18	RSO.24	Jumlah Produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	1.Peningkatan koordinasi langsung untuk perbaikan oleh perancang di Kanwil		√	4	3	Sangat Tinggi	3	2	Sedang	
			2.Peningkatan koordinasi langsung untuk percepatan perbaikan produk hukum oleh OPD dan membantu OPD dalam Memperbaiki hasil Harmonisasi		√	4	3	Sangat Tinggi	3	2	Sedang	
19	RSO.25	Jumlah Kasus yang ditangani terkait pelayanan bantuan hukum terhadap aparaturn dan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	RSO.25	Persentase Peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	RSP.24.99.02.01	Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerja	Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah sesuai dengan capaian kinerja perangkat daerah		√	3	4	Sangat Tinggi	1	2	Sedang	

22.	RSP.24.99.02.0 2	Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang belum mampu menjawab isu strategis yang dihadapinya	Melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah dan organisasi perangkat daerah sesuai dengan isu strategis yang dihadapi OPD tersebut	√	4	3	<b>Sangat Tinggi</b>	4	2	<b>Sedang</b>
23.	RSP.24.99.02.0 3	Keterlibatan pimpinan OPD dalam penetapan kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencapaian kinerja belum maksimal	Melakukan rapat koordinasi dengan kepala OPD terkait dalam penetapan kinerja agar pencapaian kinerja lebih maksimal	√	3	4	<b>Sangat Tinggi</b>	3	2	<b>Sedang</b>
24.	RSP.24.99.02.0 4	Umpan balik dari laporan kinerja yang berupa perbaikan atas perencanaan kinerja belum dirumuskan dengan baik	Melakukan perbaikan atas dokumen perencanaan pemerintah daerah , sehingga pelaksanaan dan pelaporan kinerja dapat dirumuskan dengan baik	√	3	4	<b>Sangat Tinggi</b>	2	3	<b>Sedang</b>
25.	RSP.24.99.02	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	Pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	√	3	4	<b>Sangat Tinggi</b>	2	3	<b>Sedang</b>
26.	RSP.24.99.02	Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	Bantuan hibah untuk lembaga keagamaan	√	3	4	<b>Sangat Tinggi</b>	2	3	<b>Sedang</b>
27.	RSP.24.99.02	Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	Pemberdayaan sosial ekonomi berkerjasama dengan BAZNAS	√	3	4	<b>Sangat Tinggi</b>	2	3	<b>Sedang</b>
28.	RSP.24.99.02	Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang	Pelatihan SDM terkait bidang adat dan budaya	√	3	4	<b>Sangat Tinggi</b>	2	3	<b>Sedang</b>
29.	RSP.24.99.02	Belum optimal peran dan fungsi kelembagaan adat dan budaya	Optimalisasi peran lembaga adat dan budaya	√	3	4	<b>Sangat Tinggi</b>	2	3	<b>Sedang</b>

Sarilamak, 2024

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota

**HERMAN AZMAR, AP, M.Si**

NIP 19730913 199311 1 001

## LAPORAN PEMANTAUAN RENCANA TINDAKAN PENANGANAN RISIKO SEKRETARIAT DAERAH TRIWULAN III PER SEPTEMBER 2024

NO	KODE RISIKO	DESKRIPSI KEJADIAN RISIKO	PENANGANAN RISIKO	JADWAL DAN PELAKSANAAN	KET	BIAYA PENANGANAN RISIKO (RP)		REALISASI BIAYA	STATUS PENGENDALIAN	PEMILIK RISIKO	PELAKSANA PENANGANAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN RISIKO	DIPERIKSA OLEH		REKOMENDASI / TINDAKAN LEBIH
				SESUAI / TIDAK SESUAI		RENCANA	REALISASI	(%)					UMR	SPI	
1	<i>diisi dgn kode risiko</i>	<i>uraikan kejadian risiko</i>	<i>diisi dengan penanganan risiko</i>	<i>diisi sesuai atau tidak sesuai dengan jadwal</i>	<i>diisi jika terdapat kendala atau hal yang mendukung</i>	<i>diisi dengan rencana biaya penanganan risiko</i>	<i>diisi dengan realisasi biaya penanganan risiko</i>	<i>diisi dengan persentase realisasi biaya</i>	<i>diisi dengan (pilih salah satu) SE = sangat efektif = jika telah</i>	<i>diisi dengan Unit Pemilik Risiko :Bupati (untuk tingkat Pemda), Kepala OPD (untuk tingkat</i>	<i>diisi dengan yang melaksanakan penanganan risiko</i>	<i>diisi dengan penanggung jawab penanganan risiko</i>	<i>dicentang jika sudah diperiksa oleh unit manajemen risiko</i>	<i>dicentang jika sudah diperiksa oleh satuan penguasaan</i>	<i>diisi dengan rekomendasi atau tindakan lebih</i>
2															
1.	ROO.24.99.02.01	Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	Diterbitkannya himbauan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan Dokumen SPJ	Sesuai	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	51.443.700	35.180.616	68%	E	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan			
2.	ROO.24.99.02.02	Penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	Diterbitkannya himbauan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan Dokumen Perencanaan	Sesuai	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	142.837.000	106.590.300	75%	E	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan			
3.	ROO.24.99.02.03	Terganggunya jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan yang berbasis aplikasi	Peningkatan kualitas Jaringan SIPKD dan SIPD dengan cara mengupgrade router	Sesuai		83.395.400	52.065.350	62%	E	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan			
4.	RSP.24.99.02.01	Tidak stabilnya harga barang pokok penting (harga barang naik) dan langkanya barang pokok penting di pasaran	Pemantauan Harga dan Ketersediaan Pasokan	Sesuai	pelaporan setiap hari ke aplikasi SP2KP dan Web Panel Harga	29.996.100	8.385.000	28%	E	Bupati	Petugas Pelaporan	Kepala Dinas Pangan dan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM			

			Gerakan Pasar Murah	Sesuai	Dilakukan Oleh Dinas Pangan dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM secara berkala	21.749.800	15.037.000	69%	E	Bupati	Kepala Bidang terkait	Kepala Dinas Pangan dan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM			
			Rakor TPID	Sesuai	Rapat Koordinasi dan Rapat Teknis secara berkala	103.666.500	36.577.110	35%	E	Bupati	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Sekda			
5.	RSP.24.99.02.02	Penyaluran Pupuk Bersubsidi tidak memenuhi prinsip 6T (Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu dan Tepat Mutu)	Rakor KP3	Sesuai	KP3	1.650.000	800.000	48%	E	Bupati	KP3	Asisten II			
			Monev KP3	Sesuai	KP3				E	Bupati	KP3	Asisten II			
6.	RSO.22.33.02.01	Tidak terlaksananya proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	Penyediaan Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Sesuai	Penyediaan Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sedang berlangsung	Rp0	Rp0	-	E	Pelaku pengadaan (PA, PPK, Pokja Pemilihan, PP, Penyedia)	Pelaku pengadaan (PA, PPK, Pokja Pemilihan, PP, Penyedia)	Kepala UKPBJ			
7.	RSO.24.01.99.02	Keseriusan Pejabat pengambil keputusan pada OPD masih minim	Menyampaikan surat teguran pada OPD Teknis yang belum memenuhi permintaan data IKK	Sesuai		100.020.300	66.385.000	66%	E	Kepala Daerah/Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Pemerintahan	Kepala Bagian Pemerintahan			
8.	RSO.24.01.99.02	Pelaksanaan Rapat Koordinasi belum maksimal	Teguran dari Pimpinan bagi Ka OPD yang tidak mengahdiri Rapat Koordinasi	Sesuai		38.594.200	14.290.000	37%	KE	Kepala Daerah/Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Pemerintahan	Kepala Bagian Pemerintahan			

9.	RSO.24.99.02	Sering terlambatnya OPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)	1. Peningkatan koordinasi langsung untuk mempercepat pengumpulan data 2. Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pelaksanaan APBD	Sesuai		63.519.800	35.117.000	55%	KE	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan			
10.	RSO.24.99.02	Sering terlambatnya respon OPD dalam menyediakan data yang diminta yang menyebabkan keterlambatan input data, evaluasi data, dan pengambilan tindakan pengendalian.	1, Peningkatan koordinasi langsung untuk mempercepat pengumpulan data 2. Melaksanakan pemantauan langsung ke OPD dan lapangan 3. Pengiriman surat permintaan data ke OPD	Sesuai		63.875.900	41.221.200	65%	KE	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan			
11	ROO.24.99.02	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana partisi kantor, lemari arsip , gudang arsip dan gudang perlengkapan	1. Evaluasi data kebutuhan sarana dan prasarana partisi kantor, lemari arsip , gudang arsip dan gudang perlengkapan di Renja OPD dengan anggaran yang tersedia 2. Membuat telaahan staf dan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran terkait kebutuhan sarana dan prasarana partisi kantor, lemari arsip , gudang arsip dan gudang perlengkapan	Sesuai	Koordinasi sedang berlangsung	38.999.000	25.836.000	43,65%	E	Kepala Bagian Umum	Kepala Bagian Umum	Kepala Bagian Umum Sub Koordinator Perlengkapan			

12	ROO.24.99.02	Belum terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1. Evaluasi data kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di Renja OPD dengan anggaran yang tersedia 2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran terkait kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Sesuai	Koordinasi sedang berlangsung	785.697.200	530.833.000	68%	E	Kepala Bagian Umum	Kepala Bagian Umum	Kepala Bagian Umum Sub Koordinator Perlengkapan			
13	ROO.24.99.02	Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	1. Evaluasi data kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor di Renja OPD dengan anggaran 2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran terkait kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor 3. Sosialisasi terkait SOP tentang pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	Sesuai	Koordinasi sedang berlangsung	275.087.000	253.660.000	92%	E	Kepala Bagian Umum	Kepala Bagian Umum	Kepala Bagian Umum Sub Koordinator Perlengkapan			

14	ROO.24.99.02	Belum terakomodirnya pemeliharaan seluruh kendaraan dinas operasional yang tercapat pada Kartu Inventaris Barang	<p>1. Evaluasi data kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional di Renja OPD dengan anggaran yang tersedia</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran terkait kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional</p> <p>3. Sosialisasi terkait SOP tentang pemeliharaan kendaraan dinas operasional</p>	Sesuai	Koordinasi sedang berlangsung	584.610.000	338.076.793	58%	E	Kepala Bagian Umum	Kepala Bagian Umum	Kepala Bagian Umum Sub Koordinator Perlengkapan			
15	ROO.24.99.04.02	Belum terakomodirnya Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemenuhan undangan kedinasan ke Luar Daerah	<p>1. Evaluasi kebutuhan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kunjungan ke Luar Daerah</p> <p>2. Membuat telaahan staf dan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran terkait kebutuhan</p>	Sesuai	Koordinasi sedang berlangsung	1.000.342.000	615.545.796	62%	E	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kepala Sub Bagian Protokol			

16	ROO.24.99.04.02	Belum terpenuhinya Pendampingan Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dalam Kegiatan Kunjungan ke Luar Daerah	1. Evaluasi kebutuhan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam pendampingan kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kunjungan ke Luar Daerah 2. Membuat telaahan staf dan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran terkait kebutuhan	Sesuai	Koordinasi sedang berlangsung	70.740.000	51.671.576	73%	E	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kepala Sub Bagian Protokol			
17	ROO.24.99.04.02	Belum terpenuhinya penyediaan Jasa Pengamanan Patwal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1. Evaluasi kebutuhan jasa Pengamanan Patwal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 2. Melakukan koordinasi dengan Polres 50 Kota terkait ketersediaan personil Patwal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Sesuai	Koordinasi sedang berlangsung	60.000.000	25.750.000	43%	E	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kepala Sub Bagian Protokol			
18	RSO.24	Jumlah Produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	1.Peningkatan koordinasi langsung untuk perbaikan oleh perancang di Kanwil	Sesuai		88.433.300,00	71.518.319,00	81%	KE	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Hukum	Kepala Bagian Hukum			
			2.Peningkatan koordinasi langsung untuk percepatan perbaikan produk hukum oleh OPD dan membantu OPD dalam Memperbaiki hasil Harmonisasi	Sesuai											

19	RSO.24	Jumlah Kasus yang ditangani terkait pelayanan bantuan hukum terhadap aparaturn dan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RSO.24	Persentase Peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	RSP.24.99.02.01	Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerja	Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah sesuai dengan capaian kinerja perangkat daerah	Sesuai	Minimnya alokasi anggaran untuk Bagian Organisasi	23.677.000	9.937.705	42%	SE	Kepala Daerah	Kepala Bagian Organisasi	Kepala Bagian Organisasi			
22.	RSP.24.99.02.02	Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang belum mampu menjawab isu strategis yang dihadapinya	Melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah dan organisasi perangkat daerah sesuai dengan isu strategis yang dihadapi OPD tersebut	Sesuai	Kurang kooperatifnya kepala OPD dalam melakukan perbaikan dokumen perencanaan	23.677.000	9.937.705	42%	SE	Kepala Daerah	Kepala Bagian Organisasi	Kepala Bagian Organisasi			
23.	RSP.24.99.02.03	Keterlibatan pimpinan OPD dalam penetapan kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencapaian kinerja belum maksimal	Melakukan rapat koordinasi dengan kepala OPD terkait dalam penetapan kinerja agar pencapaian kinerja lebih maksimal	Sesuai	Minimnya alokasi anggaran untuk Bagian Organisasi	30.483.500	23.367.700	77%	SE	Kepala Daerah	Kepala Bagian Organisasi	Kepala Bagian Organisasi			
24.	RSP.24.99.02.04	Umpan balik dari laporan kinerja yang berupa perbaikan atas perencanaan kinerja belum dirumuskan dengan baik	Melakukan perbaikan atas dokumen perencanaan pemerintah daerah , sehingga pelaksanaan dan pelaporan kinerja dapat dirumuskan dengan baik	Sesuai	Kurang kooperatifnya kepala OPD dalam melakukan perbaikan dokumen perencanaan	30.483.500	23.367.700	77%	SE	Kepala Daerah	Kepala Bagian Organisasi	Kepala Bagian Organisasi			
25	RSP.24.99.02	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	Pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	Sesuai	Pelatihan SDM tidak terlaksana				SE	Kepala daerah	Kepala Bagian Kesra	Kepala Bagian Kesra			

26	RSP.24.99.02	Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	Bantuan hibah untuk lembaga keagamaan	Sesuai	Tidak tersedia anggaran untuk hibah	8.533.562.000	5.369.223.983	63%	SE	Kepala daerah	Kepala Bagian Kesra	Kepala Bagian Kesra			
27	RSP.24.99.02	Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	Pemberdayaan sosial ekonomi berkerjasama dengan BAZNAS	Sesuai	Program pemberdayaan sosial ekonomi tidak berjalan				SE	Kepala daerah	Kepala Bagian Kesra	Kepala Bagian Kesra			
28	RSP.24.99.02	Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang	Pelatihan SDM terkait bidang adat dan budaya	Sesuai	Pelatihan SDM tidak terlaksana				SE	Kepala daerah	Kepala Bagian Kesra	Kepala Bagian Kesra			
29	RSP.24.99.02	Belum optimal peran dan fungsi kelembagaan adat dan budaya	Optimalisasi peran lembaga adat dan budaya	Sesuai	Pembinaan kepada lembaga adat dan budaya tidak terlaksana				SE	Kepala daerah	Kepala Bagian Kesra	Kepala Bagian Kesra			

Sarilamak, 2024  
 Sekretaris Daerah  
 Kabupaten Lima Puluh Kota

**HERMAN AZMAR, AP, M.Si**  
 NIP 19730913 199311 1 001

Disusun Oleh/Paraf/Tanggal :

Direviu Oleh/Paraf/Tanggal :

Direviu Oleh/Paraf/Tanggal :

SETELAH EVALUASI

SETELAH EVALUASI														RATA-RATA NILAI RISIKO		
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungk	Skala Risiko Komposit
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena					(30)	(31)	(32)
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
Tujuan :																
Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas											AZ					
Sasaran :																
Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Indek ABS-SBK	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan rendah	RSP.25.99.02.01	Kepala Daerah	Sarana pendidikan agama yang belum Memadai sehingga menyebabkan Rendahnya minat masyarakat untuk pendidikan agama	Internal	C	Jumlah SDM yang dibutuhkan dalam bidang keagamaan tidak memadai	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	3	9	1. Mengusulkan menambah Jumlah Sarana Pendidikan Agama 2. Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	3	3,6	10,8
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan kurang Memadai	RSP.25.99.02.02	Kepala Daerah	infrastruktur lembaga keagamaan tidak di prioritaskan	Internal	C	infrastruktur kelembagaan keagamaan tidak memadai	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	4	12	1. Memprioritaskan Insprasturuktur Lembaga Keagamaan			
		penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi Belum Optimal	RSP.25.99.02.03	Kepala Daerah	Sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi tidak memadai	Internal	C	Pemberdayaan sosial ekonomi di masyarakat tidak berjalan	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	3	9	Bekerjasama dengan BAZNAS dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat			
		Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya kurang	RSP.25.22.02.04	Kepala Daerah	Minat genenasi muda untuk mempelajari adat dan budaya Rendah	Internal	C	Jumlah SDM yang menguasai bidang adat dan budaya tidak Memadai	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	4	12	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang adat dan budaya untuk generasi muda			
		Peran dan fungsi kelembagaan adat dan budaya Belum Optimal	RSP.25.22.02.05	Kepala Daerah	Peranan penyelenggara terkait fungsi kelembagaan adat dan budaya yang Belum memadai	Internal	C	Pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan adat dan budaya akan terhambat	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	4	12	Melakukan pembinaan kelembagaan adat dan budaya			
<b>RESIKO STRATEGIS OPD</b>																
Program : Perekonomian dan Pembangunan																
Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	Kurangnya kepatuhan SKPD untuk menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) sesuai tenggat waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan	RSO.25.99.02.01	Setda/ Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Keterlambatan penyampaian Laporan RFK dari SKPD akan menyebabkan keterlambatan penginputan rekapitulasi Laporan RFK pada aplikasi pelaporan milik Biro Administrasi Pembangunan, yaitu Simbangda Based Evidence (SBE).	Internal	C	Penyampaian Rekapitulasi Laporan RFK Kabupaten Lima Puluh Kota tidak tepat waktu sesuai aturan, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Kepala Daerah, SKPD terkait	3	4	12	Melaksanakan koordinasi langsung untuk mempercepat pengumpulan data	3	4	12
		Lambatnya respon SKPD dalam menyediakan data yang diminta yang menyebabkan keterlambatan input data, evaluasi data, dan pengambilan tindakan pengendalian.	RSO.25.99.02.02	Setda/ Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Berpotensi menyebabkan keterlambatan penanganan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam pencapaian realisasi Program dan Kegiatan di atas 80%.	Internal	C	Keterlambatan penanganan terhadap permasalahan yang dihadapi SKPD.	Kepala Daerah, SKPD terkait	3	4	12	Melaksanakan koordinasi untuk sharing informasi terkait pelaporan administrasi pembangunan			
<b>Sasaran :</b>																
Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat																
Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemahaman terhadap IKK yang belum sama	RSO.25.01.99.01	Kepala Daerah / Setda	Peraturan yang mengatur berubah dan SDM yang melaksanakan penyusunan laporan masih rendah	Internal & Eksternal	C/UC	Nilai EKPPD tidak maksimal	Kepala Daerah, OPD terkait	3	3	9	Bimtek dilaksanakan untuk Kepala OPD dan pejabat yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan	3	3,6	10,8
		Keseriusan Pejabat pengambil keputusan pada OPD masih minim	RSO.25.01.99.02	Kepala Daerah / Setda	Pergantian Pejabat pada saat penyusunan laporan	Internal & Eksternal	C/UC	Nilai EKPPD tidak maksimal	Kepala Daerah, OPD terkait	3	4	12	Menyampaikan surat permintaan laporan tepat waktu			
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi belum maksimal	RSO.25.01.99.03	Kepala Daerah / Setda	Padatnya kegiatan pejabat OPD	Internal & Eksternal	C/UC	Rapat Koordinasi tidak terlaksana	Kepala Daerah, OPD terkait	3	3	9				

(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
		Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dari OPD belum Optimal	RSO.25.01.99.04	Kepala Daerah / Setda	kurangnya inisiatif OPD untuk perencanaan kerja sama	Internal & Eksternal	C/UC	Rencana Kerja Sama tidak didukung oleh APBD	Kepala Daerah, OPD terkait	3	4	12	Menyampaikan surat himbauan kepada OPD agar lebih fokus untuk perencanaan kerjasama			
		Pemahaman OPD teknis terhadap Peraturan kerja sama kurang	RSO.25.01.99.05	Kepala Daerah / Setda	kurangnya sosialisasi terhadap peraturan kerja sama baik yang umum maupun teknis	Internal & Eksternal	C/UC	Tujuan Kerja Sama tidak tercapai	Kepala Daerah, OPD terkait	3	4	12	Penambahan Anggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi			
<b>Sasaran :</b> Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien																
Program : Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	1. Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	RSO.25.99.02.01	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Keuangan, dan Sub Koordinator Pelaporan	data tidak tersedia dari stakeholder	Internal	C	Dokumen pelaporan tidak disajikan dengan benar	Sekretariat Daerah	3	2	6		3	3	8
		2. Penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	RSO.25.99.02.02	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Keuangan, dan Sub Koordinator Pelaporan	Dokumen pendukung laporan keuangan yang tidak memadai	Internal	C	dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sekretariat Daerah	3	3	9	Mengoptimalkan Dokumen pendukung laporan keuangan			
		3. Terganggunya jaringan Sistik Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan yang berbasis aplikasi.	RSO.25.99.02.03	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Keuangan, dan Sub Koordinator Pelaporan	Jaringan/ Peralatan internet yang tidak memadai	Eksternal	C	dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sekretariat Daerah	2	4	8				
<b>Tujuan :</b> 1. Mewujudkan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 2. Mewujudkan ASN yang profesional dan bebas KKN 3. Mewujudkan fungsi pelayanan LPSE yang mempercepat proses <u>Pengadaan Barang/Jasa</u>																
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Sasaran Starategis :	Jumlah paket pekerjaan melalui metode pemilihan e-purchasing/pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Tidak terlaksananya proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	RSO.25.33.02.01	Pelaku pengadaan (PA, PPK, Pokja Pemilihan, PP, Penyedia)	Para pelaku pengadaan belum maksimal dalam memahami ketentuan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	Internal	C	Adanya risiko hukum terjadinya permasalahan pengadaan barang/jasa	PA, PPK, Pokja Pemilihan, PP	4	4	16	1. Dikeluarkan edaran terhadap pengadaan barang/jasa 2. Dilakukan pendampingan terhadap pengadaan barang/jasa	4	4	16
2. Meningkatnya kapasitas dan manajemen ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang tepat waktu																
<b>Sasaran :</b> Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat																
Program :																
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Keterlambatan Pembentukan Produk hukum daerah	RSO.25.99.02.01	Kepala Daerah / Setda	Peraturan Perundang-Undangan yang masih berubah-ubah	Eksternal	UC	Pembentukan Produk Hukum Daerah yang terhambat	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	3	9		3	4	10,8
		Banyaknya Gugatan yang masuk kepada Pemerintah Daerah	RSO.25.99.02.02	Kepala Daerah / Setda	Belum optimalnya penanganan gugatan yang masuk kepada pemerintah daerah	Eksternal	UC	Penanganan gugatan tidak maksimal	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	4	12	Memilih gugatan yang lebih mendesak			



(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang masih rendah	RSO.25.99.02.01	Kepala Daerah	Tidak Linear antara tugas dan fungsi dengan latar belakang pendidikan	Internal & Eksternal	C/UC	Perlu dilinearkan sumber daya manusia yang ada sesuai bidangnya	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	3	9	Memastikan latar belakang Pendidikan dengan Tugas dan Fungsi	3	3	10
		Sarana dan Prasarana kurang memadai	RSO.25.99.02.02	Kepala Daerah	Tidak tersedianya peralatan untuk dokumentasi pimpinan dan kurangnya operasional	Internal & Eksternal	C/UC	Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	4	12	Memberikan anggaran untuk sarana dan prasarana			
		Belum optimalnya pemahaman organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap tugas dan fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RSO.25.99.02.03	Kepala Daerah	Kurangnya Pemahaman Organisasi Perangkat Daerah terhadap tugas dan Fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan sehingga kurang efektifnya informasi yang diterima terkait agenda kegiatan pimpinan	Internal & Eksternal	C/UC	Kurang terorganisir agenda kegiatan pimpinan	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	3	9	Bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah dengan protokol dan komunikasi pimpinan			
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien																
Program :Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana partisi kantor, lemari arsip, gudang arsip dan gudang perlengkapan	RSO.25.99.02.01	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Banyaknya kebutuhan Sarana dan Prasarana yang harus disediakan serta anggaran yang terbatas	eksternal	UC	Tidak terpenuhinya sarana partisi kantor, lemari arsip, gudang arsip dan gudang perlengkapan	Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Perlengkapan	3	4	12	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran	3	4	12
		Belum terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	RSO.25.99.02.02	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Banyaknya kebutuhan penyediaan dan perlengkapan alat-alat kebersihan serta anggaran yang terbatas	eksternal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan penyediaan dan perlengkapan alat-alat kebersihan	Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Perlengkapan	3	4	12	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran			
		Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	RSO.25.99.02.03	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Banyaknya biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan aula, parkir dan konstruksi atap	eksternal	UC	Tidak optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	Kepala Daerah, Pejabat Eselon II, III, IV, Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Perlengkapan, Pegawai di OPD	3	4	12	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran			
		Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	RSO.25.99.02.04	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Banyaknya komputer, printer dan sarana lainnya yang memerlukan pemeliharaan	eksternal	UC	Terhambatnya pelaksanaan tugas kedinasan	Kepala Daerah, Pejabat Eselon II, III, IV, Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Perlengkapan, Pegawai di OPD	3	4	12	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran			
		Belum terakomodirnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	RSO.25.99.02.05	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Mesin kendaraan memiliki umur mesin yang berbeda	eksternal	UC	Terhambatnya pelaksanaan tugas kedinasan	Kepala Daerah, Pejabat Eselon II, III, IV, Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Perlengkapan, Pegawai di OPD	3	4	12	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran			
<b>RESIKO OPERASIONAL OPD</b>																
Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan administrasi pembangunan daerah	Pengumpulan data realisasi fisik dan keuangan tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.25.99.02.01	Setda/ Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Terlambatnya pengolahan dan perekapan data	Internal	C	Keterlambatan penyampaian rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan	Kepala Daerah, Setda	4	4	16	Melaksanakan koordinasi langsung untuk mempercepat pengumpulan laporan	4	4	16

(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
		Kurangnya pemahaman Aparatur pelaksana pelaporan dan transfer ilmu yang tidak sempurna ketika terjadi pergantian Aparatur	ROO.25.99.02.02	Setda/ Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Internal	C	Keterlambatan penyampaian rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan	Kepala Daerah, Setda	4	4	16	Melaksanakan koordinasi langsung untuk mempercepat pengumpulan laporan			
Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Daerah																
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan fasilitasi Kerja Sama Daerah	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.25.01.99.02	Setda / Bagian Pemerintahan	Pengisian formasi keanggotaan TKKSD telah diatur secara baku oleh peraturan perundang-undangan	Eksternal	UC	Hasil Kesepakatan Bersama tidak maksimal	Kepala Daerah, Setda	3	3	9		3	4	10,5
		Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dari OPD belum Optimal	ROO.25.01.99.02	Setda / Bagian Pemerintahan	kurangnya inisiatif OPD untuk perencanaan kerja sama	Internal & Eksternal	C/UC	Rencana Kerja Sama tidak didukung oleh APBD	Kepala Daerah, Setda	3	4	12	Melaksanakan koordinasi langsung kepada OPD untuk pelaksanaan Kerja sama			
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	RSO.25.99.02.01	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Keuangan, dan Sub Koordinator	Data tidak tersedia dari stakeholder	Internal	C	Dokumen pelaporan tidak disajikan dengan benar	Sekretariat Daerah	3	2	6		3	3	8
		Penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	RSO.25.99.02.02	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Keuangan, dan Sub Koordinator Pelaporan	Dokumen pendukung laporan keuangan yang tidak memadai	Internal	C	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sekretariat Daerah	3	3	9	Adanya ketegasan pimpinan berupa peraturan tertulis dan tatatit tentang jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ			
		Terganggunya jaringan Sistim Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan yang berbasis aplikasi.	RSO.25.99.02.03	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Keuangan, dan Sub Koordinator Pelaporan	Jaringan/ Peralatan internet yang tidak memadai	Internal	UC	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sekretariat Daerah	2	4	8	Pengadaan peralatan Jaringan internet			
Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terkelolanya pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa	Perangkat Daerah dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dalam tahun berjalan, sama dengan waktu pelaksanaan fisiknya	ROO.25.33.02.01	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) melaksanakan perencanaan kegiatan yang berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku	Internal	C	1. Terlambatnya untuk memulai pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah 2. Tidak selesainya Pengadaan Barang/Jasa di akhir	PA, PPK, dan penyedia	3	3	9	Melakukan Koordinasi dengan Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan tentang perencanaan kegiatan	2	3	6,22
		Tidak tepat waktunya Perangkat Daerah dalam menyusun, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP.	ROO.25.33.02.02	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) dalam menyusun, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP	Internal	C	1. Terlambatnya untuk memulai pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah 2. Tidak selesainya Pengadaan	PA, PPK, dan penyedia	2	3	6				
		Terlambatnya Perangkat Daerah dalam menyampaikan dokumen tendernya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	ROO.25.33.02.03	Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	Internal	C	1. Terlambatnya untuk memulai pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah 2. Tidak selesainya Pengadaan	Pokja Pemilihan	2	2	4				

(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
		Tidak terlaksananya Pengendalian Kontrak	ROO.25.33.02.04	Pejabat Penandatanganan Kontrak	Belum maksimalnya Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melaksanakan Pengendalian kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan	Internal	C	1. Tidak selesainya Pengadaan Barang/Jasa di akhir tahun anggaran 2. Menimbulkan persoalan hukum dibelakang hari	PPK Kegiatan	2	2	4				
		Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan penggunaan Produk Dalam Negeri	ROO.25.33.02.05	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memahami penggunaan Produk Dalam Negeri	Internal	C	Hasil Pengadaan Barang/Jasa tidak memenuhi ketentuan penggunaan Produk Dalam Negeri	PA, PPK, dan penyedia	3	3	9	Koordinasi dengan Pengguna Anggaran agar lebih maksimal dalam memahami penggunaan Produk Dalam Negeri			
		Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan belum sepenuhnya memprioritaskan penyelenggaraan katalog lokal	ROO.25.33.02.06	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memprioritaskan penyelenggaraan katalog lokal	Internal	C	Tidak maksimalnya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi yang berasal dari APBD	PPK Kegiatan, pelaku UMKM	2	3	6				
Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .  Pembinaan Sumber Daya Manusia, pendampingan, advokasi dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya kegiatan pembinaan kepada pelaku pengadaan	Para pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan) yang <b>WAJIB</b> berasal dari Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terhitung Tanggal 1 Januari 2021	ROO.25.33.02.07	Perangkat Daerah (Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan)	Belum dimulainya proses pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Internal	C	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persoalan hukum dibelakang hari	PA, PPK, UKPBJ	3	3	9	Mengusulkan kepada BKPSDM untuk melakukan proses pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	2	3	5,63
		Para pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang tidak profesional dan handal dalam melaksanakan tugas-tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku	ROO.25.33.02.08	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia)	Tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk kebutuhan peningkatan kapasitas para pelaku pengadaan	Internal	C	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persoalan hukum dibelakang hari	PA, PPK, Penyedia, PP, Pokja Pemilihan	2	4	8				
		Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	ROO.25.33.02.09	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan)	Belum maksimalnya pelaksanaan penyusunan Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Internal	C	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persoalan hukum dibelakang hari	PPK, PP, Pokja Pemilihan	2	2	4				
		Tidak terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	ROO.25.33.02.10	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan)	Belum maksimalnya Perangkat Daerah dalam memanfaatkan " <b>Klinik Pengadaan Barang/Jasa</b> " yang ada di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Internal	C	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persoalan hukum dibelakang hari	PPK, PA, Pokja Pemilihan, PP	2	1	2				
Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terkelolanya pelaksanaan pengadaan melalui aplikasi SPSE	Tidak seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan oleh SKPD pada aplikasi SIRUP	ROO.25.33.02.11	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Belum maksimalnya pemahaman dari Pengelola Sub Kegiatan terkait pentingnya pengumuman RUP di Aplikasi SIRUP dapat dilakukan sebelum DPA ditetapkan	Internal	C	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang tepat waktu 2. Kurangnya transparansi pengumuman belanja daerah kepada masyarakat luas	PA, PPK, Penyedia	2	2	4		2	3	5

(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
		Belum maksimalnya pelayanan administrasi secara elektronik kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia)	ROO.25.33.02.1 2	Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Masih belum representatifnya sarana dan prasarana untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sumber	C	1. Tidak maksimalnya pelayanan kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa 2. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel belum sepenuhnya	PA, PPK, PP, Pokja Pemilihan, penyedia	2	3	6	Mengusulkan Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Representatif untuk layanan pengadaan secara Elektronik			
Kegiatan :Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan	Keterlambatan dalam proses harmonisasi terhadap Produk Hukum Daerah di Kanwil Kemenkumham	ROO.25.99.02.0 1	Setda / Bagian Hukum	Banyaknya Kab/Kota Di Sumatera Barat Yang Juga melaksanakan Harmonisasi Terhadap Produk Hukum Daerah di Kanwil Kemenkumham	Eksternal	C	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu regulasi	Kepala Daerah, Setda	4	3	12	Mempercepat Proses permohonan Harmonisasi Terhadap Produk Hukum Daerah di Kanwil Kemenkumham	4	3	10,5
		Keterlambatan OPD dalam memperbaiki hasil harmonisasi Produk Hukum Daerah	ROO.25.99.02.0 2	Setda / Bagian Hukum	Kurang paham dalam membaca regulasi	Eksternal	C	Terlambatnya Produk Hukum Daerah untuk di fasilitasi	Kepala Daerah, Setda	3	3	9				
Kegiatan :Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Jamaah Haji dan TPHD yang difasilitasi keberangkatan dan pemulangannya	Keterlambatan penyelesaian perbup tentang pedoman penilaian Indeks ABS-SBK	ROO.25.99.02.0 1	Setda / Bagian Kesra	Keterlambatan memahami dan menyepakati indeks yang akan menjadi pedoman penilaian	Internal	C	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu regulasi	Kepala Daerah, Setda	4	3	12	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders tentang pedoman Penilaian Indeks ABS-SBK	3	3	10
		Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.25.99.02.0 2	Setda / Bagian Kesra	Data yang ambil dari seluruh nagari tidak lengkap dan terlambat di kumpulkan	Internal	C	Terlambatnya pengolahan data	Kepala Daerah, Setda	3	3	9	Mengumpulkan data sesuai dengan skedul yang ditetapkan			
		Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.25.99.02.0 3	Setda / Bagian Kesra	Kurang paham petugas pengumpul data dan kurang koordinasi dengan tim	Internal	C	Keterlambatan penilaian Indeks ABS-SBK	Kepala Daerah, Setda	3	3	9	Melakukan Sosialisasi kepada Petugas Pengumpulan data sesuai kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam aturan			
Kegiatan :Penataan Organisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Pengumpulan data tidak tepat waktu dan tidak lengkap	RSP.25.99.02.0 1	Setda / Bagian Organisasi	Data pada perangkat daerah belum lengkap	Internal	C	Terlambatnya pengolahan data	Kepala Daerah, Setda	3	4	12	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	4	4	12,25
		Keterlambatan perangkat daerah menyampaikan data pelengkap	RSP.25.99.02.0 2	Setda / Bagian Organisasi	Kurangnya koordinasi perangkat daerah dalam mengumpulkan data	Internal	C	Terlambatnya penyusunan laporan	Kepala Daerah, Setda	3	4	12	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders tentang pengumpulan data			
		Laporan belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan	RSP.25.99.02.0 3	Setda / Bagian Organisasi	Kurangnya pengetahuan perangkat daerah tentang keselarasan indikator perencanaan dan pelaporan	Internal	C	Rendahnya nilai evaluasi internal	Kepala Daerah, Setda	4	3	12	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders tentang keselarasan indikator perencanaan dan pelaporan			
		Laporan belum sesuai dengan indikator penilaian dari Kementerian	RSP.25.99.02.0 4	Setda / Bagian Organisasi	Dokumen perencanaan belum sepenuhnya memiliki tujuan dan strategis yang mampu menjawab isu strategis yang dijawabnya	Internal	C	Rendahnya nilai SAKIP	Kepala Daerah, Setda	4	3	12	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders			
Kegiatan :Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan Penunjang Kegiatan	keterlambatan penyaluran pupuk	ROO.25.99.02.0 1	Setda / Bagian Perekonomian dan SDA	keterlambatan laporan/pengaduan dari masyarakat/kelompok tani	Eksternal	UC	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu regulasi	Setda	4	3	12	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	3	3	10
		Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.25.99.02.0 2	Setda / Bagian Perekonomian dan SDA	Data yang diambil dari seluruh kios yang ada dinagari tidak lengkap dan terlambat di kumpulkan	Eksternal	UC	Terlambatnya pengolahan data	Setda	3	3	9	Mengumpulkan data sesuai dengan skedul yang ditetapkan			
		Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.25.99.02.0 3	Setda / Bagian Perekonomian dan SDA	Kurang paham petugas pengumpul data dan kurang koordinasi dengan tim	Eksternal	UC	Keterlambatan dalam penyelesaian permasalahan	Setda	3	3	9	Memberikan pemahaman kepada petugas pengumpuldata tentang pentingnya berkoordinasi			
Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan  Fasilitasi Keprotokolan	Terpublikasinya dan terlayannya Kegiatan KDH/ WKDH	Keterlambatan penyelesaian SOP Protokol dan Komunikasi Pimpinan	ROO.25.99.02.0 1	Setda / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Keterlambatan memahami tentang standar pelayanan operasional protokol dan komunikasi pimpinan	Eksternal	UC	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu proses SOP	Kepala Daerah, Setda	4	3	12	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Bagian Organisasi	3	3	10
		Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.25.99.02.0 2	Setda / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Data yang ambil dari seluruh nagari tidak lengkap dan terlambat di kumpulkan	Eksternal	UC	Terlambatnya pengolahan data	Kepala Daerah, Setda	3	3	9	Mengumpulkan data sesuai dengan skedul yang ditetapkan			
		Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.25.99.02.0 3	Setda / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kurang paham petugas pengumpul data dan kurang koordinasi dengan tim	Eksternal	UC	Keterlambatan penilaian SOP Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Daerah, Setda	3	3	9	Memberikan pemahaman kepada petugas pengumpuldata tentang pentingnya berkoordinasi dengan tim			

